

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Sabtu-Senin, 11 – 13 Mei 2019



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Media Indonesia (halaman 1)	Sabtu, 11 Mei 2019	Birokrasi di Daerah Dinilai Hambat Investasi	Masih berbelitnya perizinan di tingkat pusat dan daerah yang dikeluhkan Presiden Joko Widodo dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, Kamis (9/5), dibenarkan sejumlah kalangan. Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Rachmat Hidayat mengungkapkan, di sisi pemerintah pusat, perizinan sudah banyak dipangkas sehingga berjalan cepat. Namun, hal itu tidak terjadi ketika investor masuk ke ranah pemerintah daerah.
2	Kompas (halaman 1)	Sabtu, 11 Mei 2019	Kampung Tempe Memupus Kesan Kumuh	Kawasan tempat produksi tempe selalu terkesan kumuh dan kotor. Akan tetapi, kehadiran Kampung Tempe di RT 003 RW 002 Kelurahan Koang Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten, mematahkan mitos tersebut. Setelah “dinobatkan” sebagai Kampung Tempe, 33 perajin di Koang Jaya juga dilatih membuat tempe yang bersih serta pelatihan pemasaran dan diversifikasi usaha.
3	Kompas (halaman 10)	Sabtu, 11 Mei 2019	Keragaman Hayati: Pembangunan Perlu Meminimalkan Dampak	Satu juta spesies flora dan fauna yang menuju kepunahan menandai krisis ekosistem global yang dampaknya akan dirasakan semua orang. Semua negara dituntut menyelaraskan pembangunannya agar tak memperparah krisis ekosistem global ini. Indonesia yang memiliki keragaman hayati tertinggi di dunia menjadi sorotan karena laju degradasi lingkungan dan kepunahan spesies flora dan faunanya terjadi dengan cepat.
4	Kompas (halaman 10)	Sabtu, 11 Mei 2019	PP Rencana Tata Ruang Dipersoalkan	Wahan Lingkungan Hidup Indonesia dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia mengajukan uji materi pada Pasal 114a Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Pasal itu dinilai melanggar aturan karena menerobos sejumlah regulasi dan perundang-undangan.
5	Koran Tempo (halaman 2)	Akhir Pekan, 11-12 Mei 2019	Kantor Staf Presiden Kaji Pembentukan Badan Baru	Badan baru akan setara dengan kementerian dalam cabinet Presiden Joko Widodo mendatang. Kantor Staf Presiden (KSP) sedang mengkaji pembentukan badan baru yang akan mendukung pemerintahan Joko Widodo mendatang. Dua badan baru yang sedang digodok KSP adalah Badan dan Riset Nasional dan Badan Manajemen Talenta Nasional. Keduanya berpeluang setara dengan kementerian dalam cabinet Jokowi kelak.
6	Media Indonesia (halaman 4)	Minggu, 12 Mei 2019	Infografis: Rencana Pemindahan Ibukota Indonesia	Akhir-akhir ini wacana pemindahan ibukota Indonesia kian santer diberitakan. Wacana ini bukanlah hal baru, karena sudah ada sejak sebelum pemerintahan Presiden Pertama Indonesia Ir. Soekarno. Pemerintah saat ini pun

				tengah melakukan kajian teknis pemindahan ibukota dan mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus yang beranggotakan para pakar dari beragam bidang keilmuan di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri.
7	Kompas (halaman 8)	Minggu, 12 Mei 2019	Perbaikan Jalur Selatan Dikebut	Dua pekan jelang arus mudik, perbaikan dan pemeliharaan jalan di jalur selatan Tegal-Purwokerto, Jawa Tengah, dikebut. Jalur itu ditargetkan siap dilalui pemudik sebelum H-4 Lebaran 2019.
8	Kompas (halaman 11)	Minggu, 12 Mei 2019	Satu Arah Diterapkan	Total pemudik Lebaran 2019 diprediksi mencapai 33 juta orang. Dengan mayoritas memilih moda transportasi jalan, kepadatan di jalan raya diprediksi sangat tinggi. Solusinya, sistem satu arah akan diterapkan. Dari jumlah itu, 22,83 juta orang akan menggunakan angkutan umum, sedangkan [0,60] juta lainnya menggunakan kendaraan pribadi.
9	Bisnis Indonesia (halaman 2)	Sabtu, 11 Mei 2019	Jalan Panjang Ibukota Baru	Sejak Presiden Joko Widodo memutuskan wacana (lama) pemindahan ibukota, yang kemungkinan besar telah diarahkan ke luar Pulau Jawa. Berbagai pemerintah daerah menyatakan kesiapannya menjadi calon ibukota. Ke mana ibukota baru akan dipindahkan? Pemerintah pusat memberikan gambaran kriteria ibukota baru yakni lokasi strategis secara geografis, tanah milik negara, aman/ bebas bencana, tersedia sumber daya air yang cukup, serta infrastruktur dan aksesibilitas seperti bandara, pelabuhan, dan jalan raya memadai.
10	Bisnis Indonesia (halaman 3)	Sabtu, 11 Mei 2019	Pemindahan Ibukota: Bappenas Dorong Skema non-APBN	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendorong penggunaan skema pembiayaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam merealisasikan pemindahan ibukota ke luar Jakarta. Sebelumnya, Bappenas sempat menyebut ada empat skema pembiayaan untuk membangun ibukota baru, yaitu APBN, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan swasta murni.
11	Bisnis Indonesia (halaman 10)	Sabtu, 11 Mei 2019	Jalur Mudik Lebaran: Rencana Sistem Satu Arah Ditentang	Pengusaha otobus keberatan dengan rencana pemerintah menerapkan sistem satu arah di Tol Trans-Jawa selama arus mudik Lebaran tahun ini lantaran angkutan bus berpotensi terlambat mengangkut penumpang. Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan menuturkan, persiapan pemerintah menjelang arus mudik dan balik Lebaran 2019 sudah mulai terasa dalam beberapa hari terakhir. Namun, dia menyalahkan beberapa kebijakan yang diambil pemerintah tidak sesuai dengan harapan pelaku usaha transportasi.
12	Republika (halaman 4)	Senin, 13 Mei 2019	Tol Trans-Sumatra Beroperasi Selama Mudik Lebaran	Jalan Tol Trans-Sumatra (JTTS) akan beroperasi pada arus mudik Lebaran 2019. Ruas tol Trans-

				Sumatra bisa langsung dimanfaatkan pemudik sejak turun dari kapal di Pelabuhan Bakauheni. Meski demikian, belum seluruh ruas tol berfungsi secara penuh.
13	Republika (halaman 13)	Senin, 13 Mei 2019	Berita Foto	Pembangunan Jalan Tol: Petugas melintasi proyek pembangunan Ruas Tol Pandaan-Malang yang belum beroperasi di Malang, Jawa Timur, Ahad (12/5). Ruas Tol Pandaan-Malang seksi I-III dari Pandaan hingga Singosari sepanjang 31 kilometer diharapkan akan memperlancar arus mudik lebaran 2019.
14	Media Indonesia (halaman 11)	Senin, 13 Mei 2019	Perbaikan Jalan Rampung H-6	Khusus persiapan infrastruktur, saat ini sedang berlangsung berbagai perbaikan jalan nasional, provinsi, maupun jalan alternatif. Persiapan menyambut arus pemudik Lebaran 2019 dimatangkan. Agar lancar, pemerintah berfokus pada tiga hal, yakni lalu lintas, infrastruktur dan pelayanan mudik gratis.
15	Bisnis Indonesia (halaman 4)	Senin, 13 Mei 2019	Berita Foto	Petugas membersihkan area gerbang tol Singosari di Malang, Jawa Timur, Minggu (12/5). Ruas Tol Pandaan-Malang seksi I-III dari Pandaan-Singosari sepanjang 31 km itu diharapkan dapat memperlancar arus mudik Lebaran 2019 di Jawa Timur. Ruas tol tersebut menurut rencana diresmikan penggunaannya oleh Presiden Joko Widodo hari ini.
16	Bisnis Indonesia (halaman 7)	Senin, 13 Mei 2019	Presiden Jokowi Resmikan Ruas Pandaan-Malang	Hari ini, Presiden Joko Widodo rencananya meresmikan pengoperasian jalan tol Pandaan-Malang. Rencana pengoperasian seksi 1 sampai dengan 3 jalan tol tersebut didapat Bisnis dari undangan peliputan dari Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, Sabtu (11/5). Pada Jumat, (10/5) Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa jalan tol Pandaan—Malang yang akan diresmikan mencakup seksi 1 hingga 3 sejauh 31 kilometer. “Pekan depan [peresmian], kemungkinan Senin peresmiannya sampai [gerbang tol] Singosari,” ujarnya.
17	Bisnis Indonesia (halaman 8)	Senin, 13 Mei 2019	Rencana Pindah Ibukota: Ada Dampak Ekologis di Tahura Bukit Soeharto	Rencana pemindahan ibukota pemerintahan, salah satunya ke Kalimantan Timur, yakni di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kertanegara akan memberi dampak ekologis bagi alam dan ketersediaan air baku. Firdaus Ali dari Indonesian Water Institute mengatakan, pemerintah masih melakukan kajian lebih mendalam atas tiga kandidat terkuat pemindahan ibukota, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Menurut Firdaus, ada beberapa dampak ekologis jika Kalimantan Timur melalui kawasan yang ditunjuk, yakni Taman Hutan Raya Bukit Soeharto menjadi ibukota negara. Oleh karena itu, akan lebih mudah untuk membangun ibukota di Kalimantan Tengah.

Judul	Birokrasi di Daerah Dinilai Hambat Investasi	Tanggal	Sabtu, 11 Mei 2019
Media	Media Indonesia (halaman 1)		
Resume	Masih berbelitnya perizinan di tingkat pusat dan daerah yang dikeluhkan Presiden Joko Widodo dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, Kamis (9/5), dibenarkan sejumlah kalangan. Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Rachmat Hidayat mengungkapkan, di sisi pemerintah pusat, perizinan sudah banyak dipangkas sehingga berjalan cepat. Namun, hal itu tidak terjadi ketika investor masuk ke ranah pemerintah daerah.		

Birokrasi di Daerah Dinilai Hambat Investasi

MASIH berbelitnya perizinan di tingkat pusat dan daerah yang dikeluhkan Presiden Joko Widodo dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, Kamis (9/5), dibenarkan sejumlah kalangan.

Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Rachmat Hidayat mengungkapkan, di sisi pemerintah pusat, perizinan sudah banyak dipangkas sehingga berjalan cepat. Namun, hal itu tidak terjadi ketika investor masuk ke ranah pemerintah daerah.

“Permasalahan itu ada di pemerintah daerah. Perizinan seperti izin lokasi, IMB, dan izin gangguan masih banyak masalah,” ujar Rachmat, Jumat (10/5). Hal itu pula yang membuat investor asing masih enggan masuk menanamkan modal di dalam negeri. “Sampai saat ini, Gapmmi belum ada kerja sama investasi dengan asing,” tuturnya.

Di tingkat pusat, Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu Damos Du-

moli Agusman menyebutkan, sebanyak 231 kesepakatan ekonomi dan MoU telah dihasilkan baru-baru ini. Sebanyak 231 kesepakatan itu terdiri atas 12 *agreement* yang merupakan *free trade agreement* (FTA/CEPA), P4M, *grant loan* (perjanjian hibah/pinjaman), dan P3B (perjanjian penghindaran pajak berganda).

Karena itu, untuk memacu kinerja ekonomi pemerintahan mendatang, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate setuju usulan adanya zaken kabinet, yaitu kabinet yang terdiri atas orang-orang ahli.

“Setuju 100%, NasDem sejalan dengan pendapat Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Kiai Syafii Ma’arif terbentuknya zaken kabinet dan memegang prinsip *presidential prerogative rights*,” tutur Johnny, Jumat (10/5).

Peneliti Departemen Politik dan Perubahan CSIS, Arya Fernandes, menilai pada susunan kabinet mendatang peluang zaken kabinet cukup terbuka lebar. (Yan/Pra/Dro/Gol/X-6)

Judul	Kampung Tempe Memupus Kesan Kumuh	Tanggal	Sabtu, 11 Mei 2019
Media	Kompas (halaman 1)		
Resume	Kawasan tempat produksi tempe selalu terkesan kumuh dan kotor. Akan tetapi, kehadiran Kampung Tempe di RT 003 RW 002 Kelurahan Koang Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten, mematahkan mitos tersebut. Setelah “dinobatkan” sebagai Kampung Tempe, 33 perajin di Koang Jaya juga dilatih membuat tempe yang bersih serta pelatihan pemasaran dan diversifikasi usaha.		

PENATAAN KOTA

Kampung Tempe Memupus Kesan Kumuh

Kawasan tempat produksi tempe selalu terkesan kumuh dan kotor. Akan tetapi, kehadiran Kampung Tempe di RT 003 RW 002 Kelurahan Koang Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten, mematahkan mitos tersebut.

Pingkan Elita Dundu

Jarum jam menunjukkan pukul 10.00. Terik matahari di Kota Tangerang menyengat kulit. Namun, panas itu tidak menyurutkan kerja para perajin tempe di Koang Jaya. Mereka mengaduk, lalu merebus kedelai dalam drum di atas perapian dari kayu bakar.

Pekerja lain sibuk membilas kedelai yang sudah direbus. Air cucian lalu dialirkan melalui saluran khusus sehingga tempat produksi tempe tetap kering dan bersih.

Setelah bersih, kedelai dicampur bubuk ragi tempe dan dimasukkan ke dalam plastik atau daun pisang. Mereka tidak menggunakan pewarna dan pengawet.

Achmad Turin (44), perajin tempe, juga telah menerapkan pola produksi bersih untuk usahanya. “Sejak menjadi Kampung Tempe sekitar dua bulan lalu, kami diajari cara memproduksi tempe dengan memperhatikan lingkungan.”

Setelah “dinobatkan” sebagai Kampung Tempe, 33 perajin di Koang Jaya juga dilatih

membuat tempe yang bersih serta pelatihan pemasaran dan diversifikasi usaha. “Selama ini kami hanya menjual tempe mentahnya saja. Belum terpekir untuk meningkatkan produk menjadi lebih bernilai, misalnya membuat produk olahan tempe untuk oleh-oleh atau tempe yang bisa dikonsumsi langsung,” kata Achmad.

Teti Kusmawati (30), perajin tempe sejak 2006, setelah ikut pelatihan mulai membuat susu kedelai dan tempe orek. “Sehari, saya memproduksi 20 botol (berukuran kecil) dan 20 bungkus orek tempe. Selain pelanggan memesan langsung, saya juga menitipkan ke tempat oleh-oleh di kantor kecamatan,” tuturnya.

Teti belum berani memproduksi dalam jumlah banyak atau mencari kanal pemasaran baru karena usaha ini termasuk baru. Ia mengaku masih harus meningkatkan pengetahuan tentang pengolahan susu kedelai dan orek tempe agar hasilnya lebih prima.

“Kalau susu kedelai, kan, tidak tahan lama. Kalau orek bisa tahan sebulan. Ke depannya, kami berharap jangkauan pemasaran produksi tempe dan hasil olahan tempe dari sini bisa meluas, bahkan bisa masuk ke toko modern, hotel, dan restoran,” ujar Teti yang menjadi perajin tempe setelah menikah dengan Hamdan (40), juga perajin tempe.

Perajin seperti Teti dan suaminya menggunakan 1 kuintal kedelai sehari guna memproduksi puluhan papan tempe berukuran panjang 2 meter. Sebagian kecil perajin memanfaatkan sedikit kedelai itu untuk produk olahan.

Selama ini, produk tempe mereka baru dijual ke Pasar Malabar, Ramadani, dan Pasar

(Bersambung ke him 11 kol 3-5)

Kampung Tempe Memupus Kesan Kumuh

(Sambungan dari halaman 1)

Anyar, Kota Tangerang.

Para perajin tempe juga sudah punya pelanggan. Akibatnya, produk dalam jumlah banyak hanya terwujud jika ada pesanan. “Kalau beli banyak, harus pesan beberapa hari sebelumnya,” kata Sukadi, perajin tempe asal Ponorogo, Jawa Timur.

Dalam sehari, Sukadi memproduksi 700-800 potong tempe dalam ukuran berbeda. Di antaranya 250 paket tempe mendoan. Setiap paket mendoan terdiri atas lima tempe yang dipotong tipis. Adapun 300 potong tempe dikemas segitiga untuk bacem. Sisanya tempe balok dan tempe bujur sangkar.

Tergusur kereta bandara

Pepep Taufik (47), perajin tempe sekaligus tokoh masyarakat setempat, mengatakan, perajin Koang Jaya semula bermukim di Kali Kober, Kota Tangerang. Di Kali Kober, perajin sudah ada sejak 1980-an.

Namun, menurut perajin, kejayaan industri tempe ter-

jadi pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Selain mendapat kedelai bersubsidi, perajin yang termasuk dalam Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia di Kota Tangerang juga ditawarkan tempat produksi yang baru di Koang Jaya.

“Industri rumahan tempe ini harus dekat dengan air atau sungai. Lokasi produksinya tidak boleh bergabung dengan masyarakat umum. Ini terkait dengan limbah,” kata Pepep.

Di Koang Jaya tersedia 115 kapling untuk perajin tempe. Perajin di Kober tergesur dan pindah ke Koang Jaya sejak 1990-an karena lahan mereka akan dibangun jalur kereta bandara.

“Awalnya hanya lima perajin yang menempati Koang Jaya. Secara bertahap, sampai 2010, kapling itu hampir penuh. Tinggal beberapa kapling yang belum ditempati karena perajinnya masih tetap berproduksi di Kober,” kata Pepep.

Ketua RT 003 RW 002 Koang Jaya, Mahdi (53), mengatakan, dari 60 keluarga di RT 003, sejumlah 33 keluarga adalah perajin tempe.

Ubah perilaku

Pada masa awal tinggal di Koang Jaya, para perajin tempe masih menerapkan cara produksi yang diperoleh turun-temurun.

Perubahan wajah Koang Jaya baru terlihat setelah Achmad Fauzan (25), pemuda RW 002, berniat menjadikan Koang Jaya sebagai Kampung Tempe. “Saya mengajak perajin tempe dan warga untuk menjadikan kampung inovasi dengan membentuk kampung tematik, Kampung Tempe.”

Perubahan dimulai dari penataan fisik kampung agar jauh dari kesan kumuh. Pemkot Tangerang kemudian juga melatih perajin tempe.

Fauzan mengaku, perubahan terus berjalan, termasuk peningkatan kapasitas perajin. Ke depan, ia berharap produksi tempe makin meningkat. Hasil olahan tempe dan kedelai juga perlu diperbanyak. Begitu pula dengan pemasaran yang masih harus diperluas. Dengan begitu, pendapatan perajin diharapkan meningkat dan Kampung Tempe semakin bersinar.

Judul	Keragaman Hayati: Pembangunan Perlu Meminimalkan Dampak	Tanggal	Sabtu, 11 Mei 2019
Media	Kompas (halaman 10)		
Resume	Satu juta spesies flora dan fauna yang menuju kepunahan menandai krisis ekosistem global yang dampaknya akan dirasakan semua orang. Semua negara dituntut menyelaraskan pembangunannya agar tak memperparah krisis ekosistem global ini. Indonesia yang memiliki keragaman hayati tertinggi di dunia menjadi sorotan karena laju degradasi lingkungan dan kepunahan spesies flora dan faunanya terjadi dengan cepat.		

KERAGAMAN HAYATI

Pembangunan Perlu Meminimalkan Dampak

JAKARTA, KOMPAS — Satu juta spesies flora dan fauna yang menuju kepunahan menandai krisis ekosistem global yang dampaknya akan dirasakan semua orang. Semua negara dituntut menyelaraskan pembangunannya agar tak memperparah krisis ekosistem global ini.

Indonesia yang memiliki keragaman hayati tertinggi di dunia menjadi sorotan karena laju degradasi lingkungan dan kepunahan spesies flora dan faunanya terjadi dengan cepat.

"Pembangunan tak bisa dihentikan, tetapi harus lebih ramah lingkungan agar tak memperparah laju kehilangan spesies. Kita punya banyak aturan tentang ini, tetapi butuh aksi nyata karena kondisinya mengkhawatirkan," kata Prof Gono Semiadi, ahli biologi dari LIPI, di Jakarta, Jumat (10/5/2019). Gono adalah National Focal Point Indonesia untuk The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES).

Dampak degradasi ekosistem dan berkurangnya spesies akan sama besarnya dengan dampak perubahan iklim pada kehidupan manusia. Selain pemerintah, masyarakat dan swasta dituntut bertanggung jawab mengatasi soal bersama.

"Ada banyak inisiatif bisa dilakukan," ujarnya. Salah satu bentuk nyata bisa dilakukan ialah mengganti pupuk kimia dan mengurangi pemakaian pestisida agar tak mengancam serangga penyerbuk dan mikroorganisme tanah. Pertanian monokultur diganti dengan permakultur demi memulihkan keragaman hayati.

"Prinsipnya kita harus menyeimbangkan berbagai kepentingan. Dunia bisnis harus ikut bertanggung jawab, tak hanya secara finansial, tetapi juga model bisnis diterapkan. Kehilangan spesies menjadi urusan semua pihak dan akan berdampak pada semua orang," ujarnya.

Berdasarkan laporan IPBES, sektor pertanian jadi pemicu utama degradasi lingkungan dan menyusutnya spesies. Degradasi lahan akibat hilangnya mikroorganisme tanah mencapai tahap kritis dan mengancam kehidupan 3,2 miliar orang. Ekosistem lahan basah, termasuk gambut, paling parah terdampak dan hilang hampir 50 persen sejak 1900. Kehancuran ekosistem itu akan mengurangi produksi tanaman pangan dan obat-obatan hingga 10 persen dalam 30 tahun ke depan.

Ibu kota baru

Guru Besar Biologi Konservasi Universitas Indonesia Jatna Suprijatna mengatakan, untuk mengurangi tekanan pada ekosistem, pembukaan hutan tersisa demi alasan pembangunan harus dihentikan. Pembangunan bisa mengoptimalkan hutan yang telanjur dibuka.

Oleh karena itu, rencana pembangunan ibu kota baru diharapkan menerapkan prinsip meminimalkan tekanan pada keberagaman hayati dan tak hanya pertimbangan ekonomi. Pemilihan lokasi hingga proses pembangunannya harus memperhatikan dampaknya pada ekosistem.

Pulau Kalimantan yang kini jadi salah satu calon ibu kota baru termasuk paling rusak ekosistemnya. "Hutan di sana hampir habis, terutama karena menjadi perkebunan sawit dan pertambangan skala besar. Jangan sampai lokasi ibu kota baru yang dipilih dengan mengonversi hutan lagi," ujarnya. (AIK)

Untuk mengurangi tekanan pada ekosistem, pembukaan hutan tersisa demi alasan pembangunan harus dihentikan.

Jatna Suprijatna

Judul	PP Rencana Tata Ruang Dipersoalkan	Tanggal	Sabtu, 11 Mei 2019
Media	Kompas (halaman 10)		
Resume	Wahan Lingkungan Hidup Indonesia dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia mengajukan uji materi pada Pasal 114a Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Pasal itu dinilai melanggar aturan karena menerobos sejumlah regulasi dan perundang-undangan.		

PP Rencana Tata Ruang Dipersoalkan

JAKARTA, KOMPAS — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia mengajukan uji materi pada Pasal 114a Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Pasal itu dinilai melanggar aturan karena menerobos sejumlah regulasi dan perundang-undangan.

Tim Advokasi Keadilan Ruang itu mempersoalkan Pasal 114a PP No 13/2017 tentang Perubahan Atas PP No 26/2008 tentang RTRW Nasional. Pasal itu mengizinkan beberapa kegiatan dalam Lampiran PP RTRW Nasional untuk melanggar rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang ditetapkan pemerintah kabupaten/kota ataupun provinsi.

Daftar proyek itu disinyalir erat dengan proyek strategis nasional. Dengan Pasal 114a PP RTRW Nasional, proyek dalam Lampiran PP itu mendapat izin pemanfaatan ruang meski tak ada di RTRW daerah. Pasal itu

menyatakan, rencana kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional ataupun berdampak besar yang belum dimuat di peraturan daerah tentang RTRW, izin pemanfaatan ruang didasarkan pada PP itu.

Hal itu dinilai merusak tatanan hukum perencanaan tata ruang yang dibangun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pembedaan dalam Pasal 114a itu merusak tatanan hukum yang dibangun UU Tata Ruang, yang mengharapkan rencana tata ruang dibuat berjenjang.

Dwi Sawung, pengampanye Energi dan Perkotaan dari Walhi, Jumat (10/5/2019), di Jakarta, menegaskan, Pasal 114a diterapkan dalam konteks riil. "Ada proyek yang cacat izinnya karena tak sesuai rencana tata ruang daerah. Di perkara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon 2, izin lingkungannya dinyatakan batal karena ketidaktaatan ruang. Namun, pemerintah mengeluarkan lagi dengan dasar Pasal 114a PP RTRW Na-

sional," ujarnya.

Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Marthin Hadiwinata menambahkan, alasan lain pengajuan uji materi ialah penyusunan RTRW tak melewati Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Nelayan tradisional berulang kali memakai instrumen hukum untuk mempertahankan ruang hidup yang terancam proyek infrastruktur mulai dari PLTU sampai tanggul laut raksasa (NCICD) dengan mengawal perizinan pemanfaatan ruang dan KLHS.

Terkait hal itu, Hariadi Kartodihardjo, Guru Besar Institut Pertanian Bogor yang juga Penasihat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan, rincian rencana tata ruang daerah belum spesifik mencantumkan nama proyek. Proyek strategis nasional harus mengikuti regulasi, termasuk syarat lingkungan. "Semua proyek tak lepas dari kualifikasi amdal dan izin lingkungan," ujarnya. (ICH)

Judul	Kantor Staf Presiden Kaji Pembentukan Badan Baru	Tanggal	Akhir Pekan, 11-12 Mei 2019
Media	Koran Tempo (halaman 2)		
Resume	Badan baru akan setara dengan kementerian dalam cabinet Presiden Joko Widodo mendatang. Kantor Staf Presiden (KSP) sedang mengkaji pembentukan badan baru yang akan mendukung pemerintahan Joko Widodo mendatang. Dua badan baru yang sedang digodok KSP adalah Badan dan Riset Nasional dan Badan Manajemen Talenta Nasional. Keduanya berpeluang setara dengan kementerian dalam cabinet Jokowi kelak.		

Kantor Staf Presiden Kaji Pembentukan Badan Baru

Badan baru akan setara dengan kementerian dalam kabinet Presiden Joko Widodo mendatang.

Avit Hidayat

avit.hidayat@tempo.co.id

JAKARTA — Kantor Staf Presiden (KSP) sedang mengkaji pembentukan badan baru yang akan mendukung pemerintahan Joko Widodo mendatang. Dua badan baru yang sedang digodok KSP adalah Badan Riset Nasional dan Badan Manajemen Talenta Nasional. Keduanya berpeluang setara dengan kementerian dalam kabinet Jokowi kelak.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan penggodokan Badan Riset Nasional telah dilaporkan kepada Presiden. Sedangkan pengkajian rencana pembentukan Badan Manajemen Talenta Nasional belum ia laporkan ke atasannya. "Kajian tentang Badan Manajemen Talenta baru selesai, tapi belum kami laporkan ke Presiden," kata Moeldoko kepada *Tempo* di Jakarta, kemarin.

Sumber yang mengetahui pembahasan badan

baru ini mengatakan, selain akan membentuk dua badan baru tersebut, kabinet Jokowi akan diperkuat dua lembaga baru, yakni Pusat Legislasi Nasional serta Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah. "Penyusunan badan baru ini hampir final," kata sumber itu.

Pembentukan keempat badan/lembaga tersebut, masih kata sumber itu, merupakan bagian dari janji kampanye Jokowi. Rencana ini sempat dilontarkan Jokowi dalam debat calon presiden. Jokowi berjanji, pada periode kedua pemerintahannya, dia akan lebih berfokus pada pembangunan sumber daya manusia, selain tetap memperkuat pembangunan infrastruktur. "Ini janji kampanye. Jadi, harus diwujudkan," ujar sumber itu.

Sumber lain, anggota Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, mengatakan tahu semua rencana pembentukan keempat badan baru ini. Menu-

rut dia, semuanya akan diisi orang-orang profesional non-partai politik. "Menurut saya, ini tidak ada urusannya dengan koalisi. Badan ini sangat praktis dan profesional," kata pria itu.

Menurut dia, pembentukan badan baru itu bermula dari keinginan Jokowi berkaca pada pengalaman India dalam mempersiapkan revolusi industri 4.0. Pejabat yang akan menempati badan baru harus berasal dari kalangan profesional. Lembaga Ekonomi & Keuangan Syariah akan diisi ahli-ahli di bidang ekonomi syariah. Badan Riset Nasional juga diisi orang-orang yang kompeten dalam bidang riset. Begitu pula Badan Manajemen Talenta Nasional dan Pusat Legislasi Nasional, akan dipimpin oleh pejabat yang memiliki kompetensi di bidang itu.

Moeldoko mengatakan pembentukan badan baru merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang akan menjadi prioritas pemerintah ke depan. Badan-badan baru ini, kata mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia ini, berpeluang

memiliki kekuatan secara politik setingkat dengan menteri.

Kabinet pemerintahan Jokowi saat ini diisi 34 menteri dan delapan pejabat setingkat menteri. Ini sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menetapkan jumlah kementerian yang boleh dibentuk oleh presiden paling banyak 34. Jika rencana penambahan empat badan baru tersebut terealisasi, dalam kabinet baru akan ada 34 menteri, ditambah 12 pejabat setingkat menteri.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, menyatakan belum mengetahui ihwal rencana pembentukan badan baru ini. "Saya belum tahu," kata dia. Adapun Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, mengatakan Presiden bisa jadi telah menyiapkan beberapa hal berkaitan dengan kabinet baru. "Namun Presiden meminta partai pendukung menunggu pengumuman resmi hasil pemilihan presiden oleh Komisi Pemilihan Umum untuk membicarakan kabinet," kata Irma.

Judul	Infografis: Rencana Pemindahan Ibukota Indonesia	Tanggal	Minggu, 12 Mei 2019
Media	Media Indonesia (halaman 4)		
Resume	Akhir-akhir ini wacana pemindahan ibukota Indonesia kian santer diberitakan. Wacana ini bukanlah hal baru, karena sudah ada sejak sebelum pemerintahan Presiden Pertama Indonesia Ir. Soekarno. Pemerintah saat ini pun tengah melakukan kajian teknis pemindahan ibukota dan mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus yang beranggotakan para pakar dari beragam bidang keilmuan di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri.		



Rencana Pemindahan Ibu Kota Indonesia

AKHIR-AKHIR ini wacana pemindahan ibu kota Indonesia kian santer diberitakan. Wacana ini bukanlah hal baru karena sudah ada sejak sebelum pemerintahan Presiden Pertama Indonesia Ir Soekarno. Pemerintah saat ini pun tengah melakukan kajian teknis pemindahan ibu kota dan mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus yang beranggotakan para pakar dari beragam bidang keilmuan di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri.

Sejarah Wacana Pemindahan Ibu Kota

- 1800-1811**
Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels
Wacana kali pertama muncul pada zaman Gubernur Jenderal Hindia Belanda.
Pusat pemerintahan yang pada saat itu berada di Batavia (Jakarta) akan dipindah ke Surabaya dan Bandung, tapi tak terlaksana.
- 1945**
Presiden Pertama RI Ir Soekarno
Beberapa kota mulai dipertimbangkan karena kekacauan di Jakarta akibat penjajahan Belanda. Daerah tersebut ialah Bandung, Malang, Surabaya, Surakarta, Kabupaten Tembung dan Magelang, sampai Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
- 22 Juni 1964**
Soekarno akhirnya menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara melalui Undang-Undang 10/1964.
- 1967-1998**
Presiden Kedua RI Soeharto
Berencana menjadikan Jonggol, Bogor, sebagai ibu kota baru.
- 2004-2014**
Presiden Keenam RI SBY
Membentuk tim khusus yang bertugas mengkaji pemindahan ibu kota, tapi tidak terlaksana.
- 2014-sekarang**
Presiden Ketujuh RI Joko Widodo
Melakukan rencana pemindahan ibu kota dengan serius sehingga menggelar rapat terbatas bersama dengan menteri Kabinet Kerja di Kantor Presiden.



Beberapa Kriteria Wajib Ibu Kota Negara

- 1 Terpadu antara fungsi-fungsi permukiman, pendidikan, pereltan, kawasan industri jasa, dan rekreasi serta didukung sistem transportasi, prasarana permukiman, dan fasilitas yang memadai.
- 2 Memiliki konsep manajemen kota yang kuat dan mampu mengondalkan pemanfaatan ruang-ruang kota dan wilayah secara efektif.
- 3 Memiliki sistem transportasi publik yang terpadu intermoda dan terpadu dengan pusat-pusat aktivitas kota berdasarkan konsep TOD (transit oriented development).
- 4 Pengembangan didasarkan pada integrated urban infrastructure management.
- 5 Memiliki kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun.
- 6 Menyediakan perumahan yang layak bagi seluruh warga melalui pengembangan permukiman campuran multistrata yang terbebas dari eksklusivisme lingkungan permukiman.
- 7 Pengembangan permukiman berbasis komunitas (community housing).

Alasan Pemindahan

- Mengubah fokus pembangunan dari Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris.
- Mengurangi beban Jakarta dan wilayah di sekitar.
- Mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa.
- Jakarta rentan terhadap bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, dan tsunami.
- Kerugian akibat kemacetan mendekati Rp100 triliun.
- 96% sungai di Jakarta tercemar berat.

Fakta Pemindahan

- Dana pemindahan yang dibutuhkan ialah **Rp323 triliun-Rp466 triliun**.
- Ibu kota baru akan diisi kementerian/lembaga, MP/DPD, kedutaan besar, serta markas besar TNI dan Polri.
- Jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang dipindahkan ialah **900 ribu-1,5 juta orang**.
- Pemindahan diperkirakan memakan waktu **5-10 tahun**.

Pertimbangan Memilih Kalimantan

- 1 Kawasan tengah Indonesia.
- 2 Sumber utama bahan baku energi nasional, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas.
- 3 Memiliki sumber air yang memadai untuk kebutuhan jangka panjang.
- 4 Daerah dengan kepadatan penduduk paling rendah di Indonesia bersama Papua.
- 5 Pulau yang paling aman dari ancaman bencana gempa bumi di Indonesia.
- 6 Salah satu wilayah yang mengalami proses pertumbuhan dan sirkulasi modal yang sangat tidak seimbang di Indonesia.

Alternatif Ibu Kota di Kalimantan

- Gunung Mas (Kalimantan Tengah)**
 - Luas ±10.804 km
 - Kaya akan daya alam (SDA) berupa industri kelapa sawit dan batu bara
- Bukit Soeharto (Kalimantan Timur)**
 - Luas ±1.000 km
 - Tidak ada permukiman sehingga menekan anggaran pembebasan lahan
 - Sudah ada dua bandara internasional di Balikpapan dan Samarinda
- Katingan (Kalimantan Tengah)**
 - Luas ±17.800 km
 - Memiliki potensi pengembangan perkebunan sawit dan pertambangan batu bara
- Kabupaten Pulang Pisau (Kalimantan Tengah)**
 - Luas ±8.997 km
 - Memiliki perkebunan perkebunan sawit yang cukup luas
- Palangka Raya (Kalimantan Tengah)**
 - Luas ±2.679 km
 - Ibu Kota Kalteng ini memang sudah disiapkan menjadi ibu kota RI sejak era Presiden Soekarno

Negara-Negara yang Sukses Memindahkan Ibu Kota

- Brasil**
Rio de Janeiro → Brasilia (1960)
Pemindahan dilakukan karena kepadatan penduduk.
Brasilia menjadi warisan dunia UNESCO karena arsitektur unik.
- Rusia**
Moskow → St. Petersburg → Moskow (1917)
Rusia sempat memindahkan ibu kota ke St. Petersburg agar lebih dekat ke Eropa.
Satu tahun kemudian mereka memindahkan kembali ibu kota ke Moskow.
- Malaysia**
Kuala Lumpur → Putrajaya (1999)
Kuala Lumpur tetap menjadi pusat perdagangan dan keuangan Malaysia.
Alasan pemindahan ialah kepadatan penduduk dan masalah tata kota.
- Inggris**
Winchester → London (1066)
Proses pemindahan berjalan mulus dan tidak menimbulkan gejolak sosial atau protes dari masyarakat.
Kota London sudah memiliki populasi cukup besar kala itu.
- Kazakhstan**
Almaty → Astana (1997)
Almaty dinilai rawan gempa dan terlalu dekat dengan perbatasan.
Astana awalnya merupakan permukiman militer.
- Pakistan**
Karachi → Islamabad (1961)
Pembangunan membutuhkan waktu dua tahun.
Islamabad memiliki indeks pembangunan tertinggi di Pakistan.
- Australia**
Melbourne → Canberra (1918)
Melbourne ialah ibu kota pertama sejak berdirinya Australia.
Canberra memenuhi syarat ibu kota karena memiliki taman yang besar di pusat kota.

Sumber: Kompas.com, Indonesia 2019, dan lain-lain

Judul	Perbaikan Jalur Selatan Dikebut	Tanggal	Minggu, 12 Mei 2019
Media	Kompas (halaman 8)		
Resume	Dua pekan jelang arus mudik, perbaikan dan pemeliharaan jalan di jalur selatan Tegal-Purwokerto, Jawa Tengah, dikebut. Jalur itu ditargetkan siap dilalui pemudik sebelum H-4 Lebaran 2019.		

Perbaikan Jalur Selatan Dikebut

SLAWI, KOMPAS — Dua pekan jelang arus mudik, perbaikan dan pemeliharaan jalan di jalur selatan Tegal-Purwokerto, Jawa Tengah, dikebut. Jalur itu ditargetkan siap dilalui pemudik sebelum H-14 Lebaran 2019.

Perbaikan dan pemeliharaan jalur selatan Tegal-Purwokerto dilakukan di dua tempat, yakni Prupuk, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dan Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Perbaikan dan pemeliharaan adalah pengecoran dan pelebaran jalan.

Pejabat Pembuat Komitmen 1.3 Jawa Tengah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jodi Pujiadi Hutomo mengatakan, pihaknya mengebut pengerasan dan pelebaran jalan sepanjang 750 meter di lajur kanan dan kiri Jalan Tegal-Purwokerto di Kelurahan Prupuk.

"Kami sudah menyelesaikan pengerasan dan pelebaran pada lajur kiri," kata Jodi di Prupuk, Sabtu (11/5/2019) sore. Selama perbaikan, petugas memberlakukan buka tutup jalan.

Menurut Jodi, jalur selatan Tegal-Purwokerto di Prupuk sudah bisa dilewati di kedua jalurnya pada 25 Mei 2019. Adapun pengerasan dan pelebaran jalan di Winduaji ditargetkan selesai 20 Mei 2019. Di jalan tersebut, pengerasan dan pelebaran dilakukan di jalan sepanjang 700 meter.

Salah satu kendala dalam pengerasan dan pelebaran jalan di Prupuk dan Winduaji adalah kepadatan kendaraan di sekitar proyek. Selain itu, hujan membuat beton susah kering.

Sementara itu, di ruas Tol Cipali, sejumlah antisipasi juga disiapkan di jalur mudik utama dari arah Jakarta ke timur dan sebaliknya. Menurut Kepala Satuan Lantas Polres Subang Ajun Komisaris Rendy Setia Permana, polisi menyiapkan sistem buka-tutup. Selain itu, menghindari *rest area* yang padat, maka akan diberlakukan sistem lawan arus. Berikutnya, pengalihan arus menuju jalan arteri.

Di ruas Tol Cipali yang masuk wilayah Subang, sekitar 40 kilometer, pada setiap 5 kilometer disiagakan mobil patroli. Mereka membantu memecah kepadatan dan merespons apabila terjadi kecelakaan.

Tol Lampung-Palembang

Di Pulau Sumatera, ruas Tol Lampung-Palembang sepanjang 363 kilometer ditargetkan bisa difungsikan saat arus mudik Lebaran atau H-7. Saat ini perbaikan jalan dan penyiapan fasilitas pendukung terus dikebut.

Keberadaan tol fungsional itu diharapkan memecah kepadatan arus dan memangkas waktu tempuh 5-7 jam ke-timbang lewat jalur bukan tol yang butuh waktu 12-15 jam.

Itu dibahas saat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengunjungi Gerbang Tol Kayu Agung, Sumatera Selatan, kemarin. Keduanya memantau kesiapan ruas Tol Bakauheni-Terbanggi Besar (141 km), Terbanggi Besar-Pematang Panggang (112 km), Pematang Panggang-Kayu Agung (77 km), dan Kayu Agung-Palembang (33 km). "Dari hasil pemantauan, diharapkan ruas tol ini dapat digunakan untuk arus mudik," kata Budi.

Melihat kondisinya, jalur tol fungsional hanya akan dibuka pukul 06.00-18.00. "Kalau ada kebutuhan khusus, tentu akan ada pengawalan," kata Budi. Pembatasan dikarenakan kurangnya lampu penerangan. (XTI/MEL/RAM)

Judul	Satu Arah Diterapkan	Tanggal	Minggu, 12 Mei 2019
Media	Kompas (halaman 11)		
Resume	Total pemudik Lebaran 2019 diprediksi mencapai 33 juta orang. Dengan mayoritas memilih moda transportasi jalan, kepadatan di jalan raya diprediksi sangat tinggi. Solusinya, sistem satu arah akan diterapkan. Dari jumlah itu, 22,83 juta orang akan menggunakan angkutan umum, sedangkan [0,60] juta lainnya menggunakan kendaraan pribadi.		

Satu Arah Diterapkan

Total pemudik Lebaran 2019 diprediksi mencapai 33 juta orang. Dengan mayoritas memilih moda transportasi jalan, kepadatan di jalan raya diprediksi sangat tinggi. Solusinya, sistem satu arah akan diterapkan.

JAKARTA, KOMPAS — Lebih dari 33 juta orang diperkirakan mudik pada Lebaran tahun ini. Dari jumlah itu, 22,83 juta orang akan menggunakan angkutan umum, sedangkan 10,61 juta lainnya menggunakan kendaraan pribadi.

Hasil survei Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan yang dikutip pada Sabtu (11/5/2019) menunjukkan, pemudik dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diprediksi mencapai separuh dari total jumlah pemudik atau sekitar 14,9 juta.

Tiga provinsi tujuan utama pemudik adalah Jawa Tengah (sebanyak 5,6 juta orang atau 37,68 persen dari total pemudik Jabodetabek), Jawa Barat (3,7 juta orang atau 24,89 persen), dan Jawa Timur (1,6 juta orang atau 11,14 persen).

Hasil survei juga menunjukkan, moda terbanyak digunakan adalah bus (4,45 juta orang atau 30 persen), diikuti mobil pribadi (4,3 juta orang atau 28,9 persen). Di urutan setelahnya kereta api (2,488 juta orang atau 16,7 persen), pesawat (1,41 juta orang atau 9,5 persen), dan sepeda motor (942.621 orang atau 6,3 persen).

Dengan mayoritas pemudik lebih memilih moda transportasi di jalan, kepadatan di jalan raya diprediksi sangat tinggi. Oleh karena itu, sistem satu arah disepakati untuk diterapkan. Sebelumnya muncul ide penerapan sistem ganjil-genap bagi kendaraan pemudik.

"Kenapa satu arah? Karena ada kecenderungan masyarakat mudik dengan rombongan, bisa 2-3 mobil, kemudian kalau ada yang (bernomor) ganjil dan yang genap pasti akan terpisah mobilnya. Selain itu, kalau kami melakukan ganjil-genap dan masyarakat tidak tahu, pasti akan ada penumpukan di pintu-pintu yang akan kami berlakukan ganjil-genap," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi.

Sistem satu arah saat arus mudik direncanakan diterapkan di jalan tol, mulai dari Cikarang Utama di ruas Tol Jakarta-Cikampek hingga Brebes Barat di ruas Tol Pejagan-Pemalang.

"Kendaraan dari arah timur, dari Brebes Barat akan keluar menggunakan jalan arteri atau jalan negara sampai ke Cirebon, kemudian Indramayu sampai ke Jakarta," katanya.

Sistem satu arah akan mulai diterapkan pada 30 Mei-2 Juni 2019. "Berlangsung selama 24 jam," tambah Budi.

Adapun selama arus balik, sistem satu arah diterapkan mulai dari Palimanan di ruas Tol Cikampek-Palimanan hingga Cikarang Utama.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno mengingatkan agar rencana penerapan sistem satu arah itu lebih gencar disosialisasikan. Salah satunya karena selama ini banyak yang tidak tahu jalan-jalan non-tol ke Jakarta.

Tol fungsional

Selain rekayasa lalu lintas, beberapa ruas tol yang masih tahap pembangunan juga bakal difungsikan. Salah satunya adalah Tol Terbanggi Besar (Lampung) hingga Palembang, bagian dari Tol Trans-Sumatera, sejauh 222 kilometer.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono se usai meninjau ruas tol itu, Sabtu, mengatakan, tol menurut rencana digunakan secara fungsional pada 29 Mei-10 Juni 2019. Ruas ini bisa dilalui pada pukul 06.00-18.00.

Sementara Kilometer 0 hingga Kilometer 141, dari Bakau-

heni ke Terbanggi Besar, seperti diketahui, sudah sejak awal Maret lalu dioperasikan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam kunjungan bersama Basuki mengatakan, ruas Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang akan dilengkapi rambu lalu lintas. Tak ketinggalan fasilitas lain, seperti SPBU, toilet, dan tempat peristirahatan.

Selain ruas tol itu, Basuki mengatakan, sebagian ruas Tol Balikpapan-Samarinda dan sebagian ruas Tol Manado-Bitung juga akan difungsikan. Adapun ruas Tol Pandaan-Malang di Jawa Timur direncanakan diresmikan pekan depan.

Tarif promo

PT Kereta Api Indonesia menjual harga tiket lebih murah bagi penumpang yang membeli tiket di luar periode mudik Lebaran. "Promo ini diharapkan memecah kepadatan penumpang kereta pada hari-hari mendekati Lebaran," kata Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro.

Edy Kuswoyo dari Humas PT KAI mengatakan, tiket mudik masih tersedia. "Yang habis terjual H-5 sampai H-1," ujarnya.

(ARN/NAD/RAM/SKA)

Judul	Jalan Panjang Ibukota Baru	Tanggal	Sabtu, 11 Mei 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 2)		
Resume	Sejak Presiden Joko Widodo memutuskan wacana (lama) pemindahan ibukota, yang kemungkinan besar telah diarahkan ke luar Pulau Jawa. Berbagai pemerintah daerah menyatakan kesiapannya menjadi calon ibukota. Ke mana ibukota baru akan dipindahkan? Pemerintah pusat memberikan gambaran kriteria ibukota baru yakni lokasi strategis secara geografis, tanah milik negara, aman/ bebas bencana, tersedia sumber daya air yang cukup, serta infrastruktur dan aksesibilitas seperti bandara, pelabuhan, dan jalan raya memadai.		

Jalan Panjang Ibu Kota Baru

Sejak Presiden Joko Widodo memutuskan wacana (lama) pemindahan Ibu Kota, yang kemungkinan besar telah diarahkan ke luar Pulau Jawa. Berbagai pemerintah daerah menyatakan kesiapannya menjadi calon Ibu Kota. Ke mana Ibu Kota baru akan dipindahkan?

Pemerintah pusat memberikan gambaran kriteria Ibu Kota baru yakni lokasi strategis secara geografis, tanah milik negara, aman/ bebas bencana, tersedia sumber daya air yang cukup, serta infrastruktur dan aksesibilitas seperti bandara, pelabuhan, dan jalan raya memadai.

Selain itu, keterjangkauan dengan laut (kota pesisir/pantai) sebagai simbol negara maritim/ bahari dan kemudahan konektivitas laut (pelabuhan), dan kota terbuka dan toleran, di mana tingkat konflik sosial rendah antara masyarakat lokal dan pendatang juga masuk prasyaratnya.

Pemerintah saat ini baru berpikir memanfaatkan Ibu Kota baru sebagai pusat pemerintahan yang dirancang untuk menampung 900.000 hingga 1,5 juta penduduk. Ibu Kota baru diharapkan bisa menggerakkan ekonomi di wilayah sekitarnya.

Kecenderungan pemerintah

gaskan bahwa pemindahan Ibu Kota merupakan rencana jangka panjang, bisa 50 atau 100 tahun lagi. Banyak pekerjaan rumah yang harus disiapkan agar terencana matang, penuh kehati-hatian, dan berkelanjutan. Lalu apa yang harus dilakukan?

Pertama, pemerintah pusat dan pemerintah daerah tingkat provinsi hingga kota/kabupaten yang menjadi kandidat Ibu Kota baru harus meninjau dan merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi dan RTRW kota/kabupaten.

Ada Perda No.5/2015 tentang RTRWP Kalimantan Tengah 2015-2035, Perda No.9/2015 tentang RTRWP Kalimantan Selatan 2015-2035, Perda No.1/2016 tentang RTRWP Kalimantan Timur 2016-2036, dan Perda No.1/2014 tentang RTRWP Sulawesi Barat 2014-2034.

Penyesuaian rencana tata ruang, peruntukan lahan milik negara, persoalan batas wilayah, antisipasi konflik sosial, serta dampak dan kapasitas daya

dukungan lingkungan merupakan



NIRWONO JOGA
Peneliti Pusat Studi
Perkotaan

untuk memilih wilayah Pulau Kalimantan memunculkan alternatif usulan kota/kabupaten sebagai kandidatnya. Pemprov Kalimantan Timur mengusulkan Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Presiden Joko Widodo pun sudah meninjau kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto (61.000 hektare), Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Pemprov Kalimantan Tengah mengajukan Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas yang ditinjau presiden pada 8 Mei lalu. Pemprov Kalimantan Selatan mengajukan Kabupaten Tanah Bumbu. Pemprov Sulawesi Barat menawarkan Kota Mamuju.

Presiden Joko Widodo mene-

beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan dalam merevisi RTRW.

Kedua, UU No.10/1964 tentang Pernyataan DKI Jakarta Raya Tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan Nama Jakarta, dan UU No.29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu ditinjau ulang.

Pemerintah harus segera berkoordinasi dengan partai politik dan DPR untuk mendapatkan dukungan politik ke depan untuk menjamin pemindahan Ibu Kota baru akan terus berlanjut, meski kelak berganti presidennya.

Ketiga, pemindahan Ibu Kota tidak serta merta menghentikan pembangunan di Jakarta dan sekitarnya sebagai pusat ekonomi dan

PUSAT PERTUMBUHAN BARU

Pemerintah ingin mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa dengan mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa.

Kota Medan, Padang, dan Palembang dapat menjadi pusat ekonomi baru di Pulau Sumatra. Kota Pontianak, Balikpapan, dan Samarinda sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan.

Kota Manado, Kendari, dan Makassar didorong menjadi pusat pertumbuhan di Pulau Sulawesi, sedangkan Kota Sorong, Jayapura dan Merauke dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Papua.

Kelima, keberadaan Ibu Kota baru diharapkan akan meningkatkan pengelolaan pemerintah pusat

working space), taman dan kebun pangan. Kota dilengkapi jaringan pipa air bersih, instalasi pengolahan air limbah terpadu, dan pengolahan sampah ramah lingkungan (zero waste).

Warga nyaman berjalan kaki atau bersepeda ke sekolah, pasar, kantor. Penerapan pembatasan kendaraan bermotor dalam kawasan kota bertujuan menekan emisi karbon dan pencemaran udara. Ada angkutan internal ramah lingkungan bertenaga listrik atau biogas.

Gedung parkir komunal untuk penghuni dan park and ride untuk tamu/pengunjung/penumpang transportasi massal.

Jika ingin keluar kawasan warga menggunakan transportasi massal terdekat.

Kota dirancang menjadi lebih layak huni dan berkelanjutan.

Judul	Pemindahan Ibukota: Bappenas Dorong Skema non-APBN	Tanggal	Sabtu, 11 Mei 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 3)		
Resume	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendorong penggunaan skema pembiayaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam merealisasikan pemindahan Ibu Kota ke luar Jakarta. Sebelumnya, Bappenas sempat menyebut ada empat skema pembiayaan untuk membangun ibukota baru, yaitu APBN, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan swasta murni.		

► PEMINDAHAN IBU KOTA

Bappenas Dorong Skema non-APBN

Bisnis, JAKARTA — Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendorong penggunaan skema pembiayaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam merealisasikan pemindahan Ibu Kota ke luar Jakarta.

Sebelumnya, Bappenas sempat menyebut ada empat skema pembiayaan untuk membangun ibu kota baru, yaitu APBN, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan swasta murni.

Adapun, menurut hitung-hitungan Bappenas, perkiraan anggaran yang dibutuhkan dalam pemindahan ibu kota dari Jakarta ke kota lain di luar Pulau Jawa mencapai Rp323 triliun—Rp466 triliun.

“Selanjutnya, ketika kota yang dipilih telah siap untuk menjadi pusat pemerintahan, akan dilakukan proses revisi UU daerah khusus ibu kota [UU No. 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara,” ujarnya dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi di Jakarta, Jumat (10/5).

Bambang menyebut pemindahan dan proses pembangunan ibu kota dapat dilakukan dalam 5 tahun.

“Dalam 5 tahun pun sangat dimungkinkan asal tahun ini pemerintah sudah bisa putuskan jelas lokasinya. Semua lahan sudah bersih. Jadi tahun depan sudah dibangun infrastruktur dasar, dan penataan kota juga bisa dilakukan,” jelasnya.

Pemindahan ibu kota, katanya, menjadi salah satu rencana strategis jangka panjang. “Guna mewujudkannya tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, namun bukan berarti mustahil asal fondasi dasar telah dipersiapkan mulai dari sekarang.”

Soal pemilihan lokasi, Bambang menilai juga harus mempertimbangkan keterjangkauan pengiriman material. “Perlu penguatan manajemen pembangunan yang baik.”

Laporan sebelumnya menyebut pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 300.000 hektare di atas lahan negara untuk dibangun sebagai Ibu Kota baru Indonesia.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menyampaikan pemilihan lahan negara dirasa bijaksana agar dapat meminimalisasi pengeluaran negara untuk biaya pembebasan lahan. *(Asteria Desi Kartika Sari/Hery Trianto)*

Judul	Jalur Mudik Lebaran: Rencana Sistem Satu Arah Ditentang	Tanggal	Sabtu, 11 Mei 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 10)		
Resume	Pengusaha otobus keberatan dengan rencana pemerintah menerapkan sistem satu arah di Tol Trans-Jawa selama arus mudik Lebaran tahun ini lantaran angkutan bus berpotensi terlambat mengangkut penumpang. Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan menuturkan, persiapan pemerintah menjelang arus mudik dan balik Lebaran 2019 sudah mulai terasa dalam beberapa hari terakhir. Namun, dia menyangkan beberapa kebijakan yang diambil pemerintah tidak sesuai dengan harapan pelaku usaha transportasi.		

Rencana Sistem Satu Arah Ditentang

Bisnis, JAKARTA — Pengusaha otobus keberatan dengan rencana pemerintah menerapkan sistem satu arah di Tol Trans-Jawa selama arus mudik Lebaran tahun ini lantaran angkutan bus berpotensi terlambat mengangkut penumpang.

Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan menuturkan, persiapan pemerintah menjelang arus mudik dan balik Lebaran 2019 sudah mulai terasa dalam beberapa hari terakhir. Namun, dia menyangkan beberapa kebijakan yang diambil pemerintah tidak sesuai dengan harapan pelaku usaha transportasi.

“Kebijakan pemberlakuan satu arah untuk pemudik H-6 Lebaran yakni 31 Mei hingga 2 Juni 2019 berpotensi menghambat angkutan bus masuk ke Jakarta. Padahal di saat yang sama, pemerintah memperkirakan hari-hari itu adalah puncak arus mudik,” katanya kepada *Bisnis*, Jumat (10/5). Dia mengatakan, kebijakan

sistem satu arah akan diberlakukan mulai dari Cikarang Utama sampai KM 262 atau Brebes Barat.

Menurutnya, hal itu akan memicu penumpukan penumpang bus di Jabodetabek. Pasalnya, kendaraan dari arah timur, harus keluar di gerbang tol Brebes Barat dan menggunakan jalan arteri atau jalan negara sampai ke Cirebon kemudian ke Indramayu hingga ke Jakarta.

Artinya, waktu tempuh menuju Jakarta menjadi lebih panjang dan keterlambatan tidak bisa dihindarkan.

“Dengan penerapan *one way* 3 hari seperti rencana, *potential lost* bisa-bisa lebih dari 15%, karena lonjakan penumpang tidak terangkut,” ujarnya.

Menurut dia, keterlambatan dan hambatan perjalanan membuat angkutan bus menjadi tidak kompetitif.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan bahwa perekonomian masyarakat di

jalan non-tol akan bergeliat dengan diterapkannya sistem satu arah.

Pasalnya, setiap kendaraan yang berarah sebaliknya pasti harus melalui jalur jalan nasional atau alternatif yang akan mendukung perekonomian di daerah tersebut. Hal itu menjadi salah satu pertimbangan saat menyusun kebijakan.

Dia menuturkan bahwa ada beberapa alasan yang membuat pihaknya memilih kebijakan satu arah ketimbang penerapan sistem ganjil-genap.

Menurutnya, ada kecenderungan masyarakat mudik dalam rombongan sehingga sistem ganjil-genap berpotensi membuat rombongan bisa terpisah.

Pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setiowarno menilai, pemberlakuan jalur satu arah tersebut harus disosialisasikan dengan baik, agar seluruh pemangku kepentingan dapat mengerti dan tahu skema tersebut.

Sementara itu, Kementerian

Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) berencana meninjau kesiapan Tol Trans-Sumatra menjelang masa angkutan Lebaran 2019.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, jalan tol dari Bakauheni hingga Palembang sejauh 350 kilometer bisa digunakan pemudik saat masa mudik Lebaran yang diperkirakan dimulai pada 30 Mei 2019.

“Besok saya akan lihat dari Terbanggi Besar ke Kayu Agung. Terakhir saya lihat masih ada satu jembatan belum jadi, Mei ini sudah jadi,” ujarnya, Jumat (10/5).

Basuki mengatakan, jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar (140,9 kilometer) sudah beroperasi. Selanjutnya, tiga ruas lain yang masih dalam tahap konstruksi akan dibuka untuk pemudik mulai pukul 06.00 s.d 18.00. Ketiga ruas itu yakni Terbanggi Besar-Pematang Panggang, Pematang Panggang-Kayu Agung, dan Kayu Agung-Betung Seksi I.

(Rinaldi M. Azka/Rivki Maulana)

Judul	Tol Trans-Sumatra Beroperasi Selama Mudik Lebaran	Tanggal	Senin, 13 Mei 2019
Media	Republika (halaman 4)		
Resume	Jalan Tol Trans-Sumatra (JTTS) akan beroperasi pada arus mudik Lebaran 2019. Ruas tol Trans-Sumatra bisa langsung dimanfaatkan pemudik sejak turun dari kapal di Pelabuhan Bakauheni. Meski demikian, belum seluruh ruas tol berfungsi secara penuh.		

Tol Trans-Sumatra Beroperasi Selama Mudik Lebaran

● MURSALIN YASLAND

BANDAR LAMPUNG — Jalan Tol Trans-Sumatra (JTTS) akan beroperasi pada arus mudik Lebaran 2019. Ruas tol Trans-Sumatra bisa langsung dimanfaatkan pemudik sejak turun dari kapal di Pelabuhan Bakauheni. Meski demikian, belum seluruh ruas tol berfungsi secara penuh.

Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung Heriyansyah mengatakan, pemudik bisa menggunakan ruas tol untuk menghindari kemacetan di beberapa titik arus mudik di Jalan Lintas Sumatra (Jalinsum). Ruas tol yang akan dioperasikan selama musim mudik Lebaran 2019, yakni JTTS Bakauheni menuju Pematang Panggang di Kabupaten Mesuji.

Heriyansyah menyebutkan, JTTS ruas Bakauheni menuju Terbanggi Besar dengan panjang sekitar 140 kilometer sudah beroperasi penuh sejak awal diresmikan. Tapi, untuk ruas JTTS Terbanggi Besar menuju Pematang Panggang Kabupaten Mesuji sepanjang 100 kilometer masih berstatus fungsional atau

dalam pengerjaan.

“Untuk ruas Terbanggi Besar sampai Pematang Panggang hanya dibuka pada siang hari karena minim lampu jalan dan rambu lalu lintas,” kata Heriyansyah, Ahad (12/5). Berbeda dengan JTTS Bakauheni menuju Terbanggi Besar yang sudah bisa dilalui saat siang dan malam karena sudah dilengkapi rambu lalu lintas dan lampu jalan. Bahkan, pemudik bisa menggunakan *rest area* yang sudah disediakan.

Dengan status fungsional, ruas tol Terbanggi Besar menuju Pematang Panggang hanya dibuka sejak pukul 06.00 sampai 18.00 WIB. Pemprov Lampung tidak memperkenankan pemudik melintas di ruas tersebut pada malam hari. Pemudik diharapkan bisa menyesuaikan waktu pergi dengan jam operasional JTTS yang dimulai dari kilometer 140 hingga 238.

Selama arus mudik Lebaran 2019, lanjut Heriyansyah, jalan Tol Trans-Sumatra akan dibuka pada 28 Mei sampai 10 Juni 2019 atau H-10 dan H+10 Idul Fitri. Selama jalan tol fungsional pada arus mudik dan balik, pengerjaan jalan tol dihentikan

sementara dan material dibersihkan.

Menurut Heriyansyah, beroperasinya tol akan menjadi alternatif pemudik menghemat waktu tempuh selama perjalanan mudik. Pemudik juga bisa menghindari hambatan, seperti kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi di Jalinsum. Sebelumnya, apabila menggunakan Jalinsum, waktu tempuh dari Pelabuhan Bakauheni menuju Kota Bandar Lampung mencapai sekitar tiga jam. Tapi, dengan melewati tol, hanya memakan waktu satu jam.

Kemudian, Jalinsum dari Kota Bandar Lampung menuju Pematang Panggang Kabupaten Mesuji biasanya memakan waktu lebih dari lima jam dengan syarat kondisi arus lalu lintas normal.

Sementara, dengan menggunakan akses tol, jarak dari Kota Bandar Lampung menuju Pematang Panggang bisa ditempuh sekitar tiga jam. Selain ruas tol Bakauheni hingga Pematang Panggang, ruas JTTS Pematang Panggang menuju Kayuagung Sumatra Selatan dan Palembang juga akan beroperasi selama arus mudik Lebaran 2019. ■ **ed:** nora azizah

Judul	Berita Foto	Tanggal	Senin, 13 Mei 2019
Media	Republika (halaman 13)		
Resume	Pembangunan Jalan Tol: Petugas melintasi proyek pembangunan Ruas Tol Pandaan-Malang yang belum beroperasi di Malang, Jawa Timur, Ahad (12/5). Ruas Tol Pandaan-Malang seksi I-III dari Pandaan hingga Singosari sepanjang 31 kilometer diharapkan akan memperlancar arus mudik lebaran 2019.		



PEMBANGUNAN JALAN TOL Petugas melintasi proyek pembangunan Ruas Tol Pandaan-Malang yang belum beroperasi di Malang, Jawa Timur, Ahad (12/5). Ruas Tol Pandaan-Malang seksi I-III dari Pandaan hingga Singosari sepanjang 31 kilometer diharapkan akan memperlancar arus mudik lebaran 2019.

Judul	Perbaikan Jalan Rampung H-6	Tanggal	Senin, 13 Mei 2019
Media	Media Indonesia (halaman 11)		
Resume	Khusus persiapan infrastruktur, saat ini sedang berlangsung berbagai perbaikan jalan nasional, provinsi, maupun jalan alternatif. Persiapan menyambut arus pemudik Lebaran 2019 dimatangkan. Agar lancar, pemerintah berfokus pada tiga hal, yakni lalu lintas, infrastruktur dan pelayanan mudik gratis.		

Perbaikan Jalan Rampung H-6

Khusus persiapan infrastruktur, saat ini sedang berlangsung berbagai perbaikan jalan nasional, provinsi, maupun jalan alternatif.

AKHMAD SAFUAN
safuan@mediaindonesia.com

PERSIAPAN menyambut arus mudik Lebaran 2019 dimatangkan. Agar lancar, pemerintah berfokus pada tiga hal, yakni lalu lintas, infrastruktur, dan pelayanan mudik gratis.

Pada tahun ini mudik diperkirakan berlangsung mulai 29 Mei 2019. Berdasarkan pemantauan *Media Indonesia*, kemarin, pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kepolisian serta semua pihak terkait terus berupaya menyiapkan infrastruktur

murid.

Hal-hal yang mereka lakukan, antara lain menyelesaikan perbaikan jalan yang disebut siang dan malam, melakukan rekayasa lalu lintas di beberapa titik rawan, hingga persiapan armada. "Kita sudah menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Perhubungan, kepolisian, dan para pihak terkait. Kita fokuskan pada tiga titik, yaitu lalu lintas, infrastruktur, dan pelayanan mudik gratis," kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Jika pada mudik sebelumnya diwaspadai kemacetan di Brebes Exit (Brexid), lanjut Ganjar, sekarang terdapat beberapa titik rawan yang tetap diwaspadai, seperti pasar tumpah, pelintasan kereta api, dan beberapa pintu keluar Tol Trans-Jawa. "Saya telah instruksikan daerah untuk melakukan antisipasi, terutama pasar tumpah," tambahnya.

Khusus persiapan infrastruktur, saat ini sedang berlangsung berbagai perbaikan jalan nasional, provinsi, mau-

pun jalan alternatif yang diperkirakan rampung pada H-6.

Terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, memastikan jalan nasional yang akan digunakan pada arus mudik dan arus balik akan nyaman bagi pengendara. Hal itu diungkapkannya saat meninjau Tol Pematang Panggang-Kayuagung, Sabtu (11/5).

Seperti jalan lintas timur Palembang-Jambi yang rusak parah sejak beberapa bulan terakhir, dia mengatakan pihaknya telah turun langsung untuk mengecek kondisi jalan dan telah melakukan berbagai upaya perbaikan darurat.

"Saya telah sampaikan jalan Palembang-Jambi, di Musi Banyuasin, sudah mulai dikerjakan. Hal itu karena dua kali tender batal dan saya sudah kirim Dirjen Bina Marga untuk mengecek," kata Basuki.

Di lain hal, Polres Tasikmalaya Kota sedang menyiapkan rekayasa arus

mudik dan balik di lintas selatan Jawa Barat menuju Jawa Tengah melalui jalan alternatif. Peningkatan pemudik menjelang Lebaran nanti diprediksi akan meningkat. Sebagai solusi, tetap dilakukan koordinasi antar- Polres Ciamis, Polres Garut, dan Polres Banjar

Naik 60%

Sementara itu, jumlah penumpang kapal pada mudik tahun ini diprediksi meningkat hingga 60%. Untuk itu, operator kapal swasta meminta Kementerian Perhubungan menambah kapasitas kapal hingga 40%.

Operator kapal PT Bukit Merapin Nusantara Line (BMNL), Darwati, mengatakan pada 25 Mei mendatang salah satu kapal penumpang, yaitu KM Srikandi Line berkapasitas 340 penumpang sudah habis masa operasional dan harus menjalani perawatan. "Kami sudah mengajukan penambahan 20% ke Kementerian Perhubungan," ungkapnya. (DW/AD/RF/N-3)

Judul	Berita Foto	Tanggal	Senin, 13 Mei 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 4)		
Resume	Petugas membersihkan area gerbang tol Singosari di Malang, Jawa Timur, Minggu (12/5). Ruas Tol Pandaan-Malang seksi I-III dari Pandaan-Singosari sepanjang 31 km itu diharapkan dapat memperlancar arus mudik Lebaran 2019 di Jawa Timur. Ruas tol tersebut menurut rencana diresmikan penggunaannya oleh Presiden Joko Widodo hari ini.		

► TOL PANDAAN-MALANG



Antara/Rivan Awal Lingga

Petugas membersihkan area gerbang tol Singosari di Malang, Jawa Timur, Minggu (12/5). Ruas Tol Pandaan-Malang seksi I-III dari Pandaan-Singosari sepanjang 31 km itu diharapkan dapat memperlancar arus mudik Lebaran 2019 di Jawa Timur. Ruas tol tersebut menurut rencana diresmikan penggunaannya oleh Presiden Joko Widodo hari ini.

Judul	Presiden Jokowi Resmikan Ruas Pandaan-Malang	Tanggal	Senin, 13 Mei 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 7)		
Resume	Hari ini, Presiden Joko Widodo rencananya meresmikan pengoperasian jalan tol Pandaan-Malang. Rencana pengoperasian seksi 1 sampai dengan 3 jalan tol tersebut didapat <i>Bisnis</i> dari undangan peliputan dari Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, Sabtu (11/5). Pada Jumat, (10/5) Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa jalan tol Pandaan—Malang yang akan diresmikan mencakup seksi 1 hingga 3 sejauh 31 kilometer. “Pekan depan [peresmian], kemungkinan Senin peresmiannya sampai [gerbang tol] Singosari,” ujarnya.		

► JALAN TOL

Presiden Jokowi Resmikan Ruas Pandaan—Malang

Bisnis, JAKARTA — Hari ini, Presiden Joko Widodo rencananya meresmikan pengoperasian jalan tol Pandaan-Malang.

Rencana pengoperasian seksi 1 sampai dengan 3 jalan tol tersebut didapat *Bisnis* dari undangan peliputan dari Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, Sabtu (11/5).

Pada Jumat, (10/5) Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa jalan tol Pandaan—Malang yang akan diresmikan mencakup seksi 1 hingga 3 sejauh 31 kilometer. “Pekan depan [peresmian], kemungkinan Senin peresmiannya sampai [gerbang tol] Singosari,” ujarnya.

Jalan tol Pandaan—Malang semula diusulkan untuk diresmikan pada 12 April 2019. Konstruksi jalan tol di tiga seksi sejauh 31 km sudah rampung dan siap dioperasikan. Sementara itu, dua seksi, yakni seksi 4 dan seksi 5 sejauh 8 kilometer sempat terhambat, karena ditemukan material benda cagar budaya.

PT Jasa Marga Tbk. melalui anak usahanya yakni PT Jasamarga Pandaan Malang memegang konsesi jalan tol Pandaan—Malang.

Secara keseluruhan, investasi pembangunan jalan tol tersebut Rp5,90 triliun dengan nilai konstruksi Rp3,70 triliun.

Di tempat terpisah, Basuki memastikan jalan tol Trans-Sumatra dari Terbanggi Besar, Lampung, hingga ke Palembang sepanjang 232 km bisa dilalui saat arus mudik Lebaran 2019 meski ruas tersebut masih berstatus fungsional.

Ruas tol yang akan dibuka fungsional pada saat mudik, tepatnya H-7 Idulfitri, adalah dari Terbanggi Besar menuju Pematang Panggang lanjut ke Kayu Agung hingga ke Palembang.

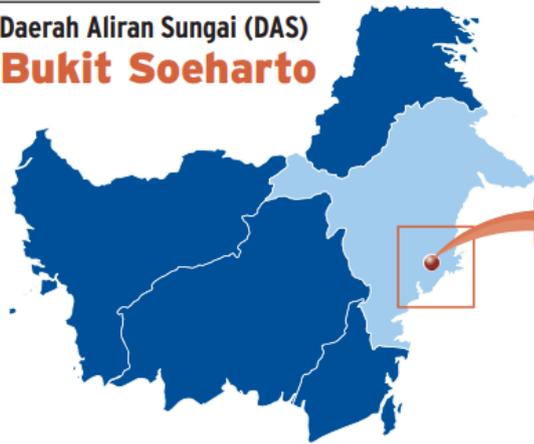
“Dari Terbanggi Besar—Pematang Panggang itu fungsional, tetapi sudah rasa operasional, di sana sudah ada *rest area*-nya, tetapi belum lengkap,” katanya saat meninjau pembangunan ruas tol Pematang Panggang—Kayu Agung di Desa Kijang, Ogan Komering Ilir, Sumsel, Sabtu (11/5).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa kehadiran jalan tol Trans-Sumatra tersebut bisa memangkas waktu tempuh Lampung—Palembang dari biasanya sekitar 12 jam menjadi sekitar 7 jam. (*Rivki Maulana/Dinda Wulandari/Kahfi*)

Judul	Rencana Pindah Ibukota: Ada Dampak Ekologis di Tahura Bukit Soeharto	Tanggal	Senin, 13 Mei 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 8)		
Resume	Rencana pemindahan ibukota pemerintahan, salah satunya ke Kalimantan Timur, yakni di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kertanegara akan memberi dampak ekologis bagi alam dan ketersediaan air baku. Firdaus Ali dari Indonesian Water Institute mengatakan, pemerintah masih melakukan kajian lebih mendalam atas tiga kandidat terkuat pemindahan ibukota, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Menurut Firdaus, ada beberapa dampak ekologis jika Kalimantan Timur melalui kawasan yang ditunjuk, yakni Taman Hutan Raya Bukit Soeharto menjadi ibukota negara. Oleh karena itu, akan lebih mudah untuk membangun ibukota di Kalimantan Tengah.		

Ada Dampak Ekologis di Tahura Bukit Soeharto

Daerah Aliran Sungai (DAS) Bukit Soeharto



Bukit Soeharto dialiri oleh tujuh daerah aliran sungai (DAS) yang bermuara pada tiga tempat, yakni Sungai Mahakam dan Sungai Loa Haur, DAS yang bermuara di Selat Makassar adalah Sungai Seluang, Tiram, Bangsal, Serayu, dan Salok Cempedak. Ketiga, DAS yang bermuara di Teluk Balikpapan adalah Sungai Semoi.

BISNIS/RADITYO EKO

Kalteng menjadi pertimbangan penting," sambung Firdaus.

Menurutnya, masalah ekologis lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah risiko banjir yang akan mengancam Kota Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kertanegara. Dia menilai, kawasan Tahura Bukit Soeharto juga mengalami kebakaran hutan dan juga pemicu banjir.

Bisnis, SAMARINDA — Rencana pemindahan ibu kota pemerintahan, salah satunya ke Kalimantan Timur, yakni di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kertanegara akan memberi dampak ekologis bagi alam dan ketersediaan air baku.

Gloria FK Lawi
gloria.fransisca@bisnis.com

Firdaus Ali dari Indonesian Water Institute mengatakan, pemerintah masih melakukan kajian lebih mendalam atas tiga kandidat terkuat pemindahan ibu kota, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Menurut Firdaus, ada beberapa dampak ekologis jika Kalimantan Timur melalui kawasan yang ditunjuk, yakni Taman Hutan Raya Bukit Soeharto menjadi ibu kota negara. Oleh karena itu, akan lebih mudah untuk membangun ibu kota di Kalimantan Tengah.

"Jika dipilih di Kaltim, khususnya Tahura Bukit Soeharto, tentu risiko lingkungan akan lebih besar ketimbang di Kalteng

yakni Kabupaten Gunung Mas," terang Firdaus saat dihubungi *Bisnis*, Kamis (9/5).

Menurut Firdaus, Tahura Bukit Soeharto adalah kawasan konservasi dan merupakan area resapan air untuk Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Luas Tahura Bukit Soeharto berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 419/Menhut-II/2004 pada Oktober 2004 adalah 61.850 hektare.

Berdasarkan UU No. 5/1990, Tahura adalah kawasan konservasi pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan Tahura Bukit Soeharto juga adalah ekosistem hutan yang dilindungi, termasuk tumbuhan, satwa, sehingga berlokasi tak jauh dari permukiman karena bisa menjadi area wisata.

Adapun di Kalteng, Kabupaten Gunung Mas merupakan daerah dataran yang luas dari segi ketinggian serta sangat aman. Lokasi ini juga belum sepenuhnya akan berdampak pada Pegunungan Maratus yang membentang dari Kalsel, Kalteng, dan Kaltim.

"Kemudahan dalam membangun infrastruktur dan pembebasan lahan di

SISTEM AIR

Senada dengan Firdaus, Pemerhati Sosial dan Lingkungan Hidup dari The Nature Conservancy (TNC) Kaltim, Niel Makinuddin menyatakan bahwa Tahura Bukit Soeharto sebenarnya berfungsi secara hidrologis sebagai sistem air bagi Balikpapan, Samarinda, Kutai Kertanegara, sampai Penajam Paser Utara.

Niel mengatakan Bukit Soeharto dialiri oleh tujuh daerah aliran sungai (DAS) yang bermuara pada tiga tempat, yakni Sungai Mahakam dan Sungai Loa Haur, DAS yang bermuara di Selat Makassar adalah Sungai Seluang, Tiram, Bangsal, Serayu, dan Salok Cempedak. Ketiga tempat itu adalah DAS yang bermuara di Teluk Balikpapan adalah Sungai Semoi.

"Bukit Soeharto ini sumbernya sumber air bersih di tiga wilayah Kaltim," kata Niel.

Selain sumber air bersih, ekosistem keanekaragaman hayati di Tahura Bukit Soeharto juga bisa terancam. Asal tahu saja, kawasan ini sudah menjadi tempat rehabilitasi bagi tanaman sejenis akasia, sengon, meranti, hingga mahang. Sementara untuk fauna di Bukit Soeharto, kawasan ini adalah ekosistem bagi orang utan, beruang madu, macan dahan, landak, owa-owa, trenggiling, rusa sambar, tupai, musang, cucak rawa, babi hutan, hingga biawak. Oleh sebab itu, Niel mengusulkan jika Tahura Bukit Soeharto difokuskan sebagai kawasan wisata terpadu untuk pendidikan.

"Kalau harus dipaksakan di Bukit Soeharto, rasanya terlalu mahal harga kehilangan kekayaan hayati tumbuhan dan binatang serta jasa lingkungan," tegasnya. □

► **Kawasan Tahura Bukit Soeharto juga adalah ekosistem hutan yang dilindungi, termasuk tumbuhan, satwa, sehingga berlokasi tak jauh dari permukiman karena bisa menjadi area wisata.**